

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KETERSEDIAAN DAN  
KETERAKSESAN *INTERNET FINANCIAL  
REPORTING* OLEH PEMERINTAH DAERAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro**

**Disusun oleh:**

**IKHLAS WAU  
NIM. 12030113183009**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2015**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KETERSEDIAAN DAN  
KETERAKSESAN *INTERNET FINANCIAL*  
*REPORTING* OLEH PEMERINTAH DAERAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro**

**Disusun oleh:**

**IKHLAS WAU  
NIM. 12030113183009**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2015**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ikhlas Wau  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030113183009  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KETERSEDIAAN  
DAN KETERAKSESAN *INTERNET  
FINANCIAL REPORTING* OLEH  
PEMERINTAH DAERAH**

Dosen Pembimbing : Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt

Semarang, Juli 2015  
Dosen Pembimbing,



(Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt.)  
NIP.198010012008011014

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

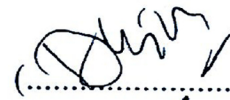
Nama Mahasiswa : Ikhlas Wau  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030113183009  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KETERSEDIAAN  
DAN KETERAKSESAN *INTERNET*  
*FINANCIAL REPORTING* OLEH  
PEMERINTAH DAERAH**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal Agustus 2015

Tim Penguji

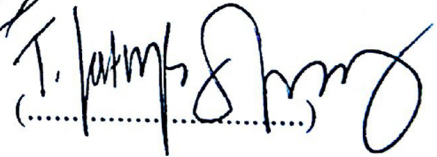
1. Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt.

  
(.....)

2. Drs. H. Sudarno, M.Si., Ph.D., Akt.

  
(.....)

3. Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si., Ph.D., Akt

  
(.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ikhlas Wau, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERSEDIAAN DAN KETERAKSESAN *INTERNET FINANCIAL REPORTING* OLEH PEMERINTAH DAERAH”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Semarang,            Juli 2015

Yang membuat pernyataan,

(Ikhlas Wau)

NIM: 12030113183009

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* (IFR) oleh pemerintah daerah. Variabel yang digunakan untuk menilai ketersediaan dan keteraksesan adalah kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian finansial pemerintah daerah, pendapatan per kapita masyarakat dan opini audit. Penelitian ini menggunakan sebanyak 112 pemerintah daerah yang ada di Pulau Jawa dengan menilai ketersediaan dan keteraksesan IFR melalui website masing-masing pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode regresi logistik ordinal untuk ketersediaan informasi keuangan dan metode regresi berganda untuk keteraksesan informasi keuangan.

Hasil penelitian menggunakan regresi logistik ordinal menemukan bahwa pendapatan per kapita masyarakat dan opini audit berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan pada website pemerintah. Hasil penelitian menggunakan regresi berganda menemukan bahwa rasio kemandirian finansial pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap keteraksesan informasi keuangan pada website pemerintah.

Kata kunci :Transparansi, Pemerintah Daerah, Website Resmi Pemerintah Daerah, Pengungkapan Informasi Keuangan, Informasi Keuangan

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze factors affecting availability and accessibility of Government's internet financial reporting (IFR). Factors which are going to be tested are political competition, local government's size, local government's financial independency, income per capita and audit opinion. This study examines 112 local government on Java Island based on availability and accessibility from its website. This study tested by two methods, ordinal regression method for the avaiability and multiple regression method for the accessibility.*

*The study using ordinal regression found that income per capita and audit opinion has positive relationship to the availability of financial information on the Government's website. The study using multiple regression found that local government's financial independency has positive relationship to the accessibility of financial information in Government's website.*

*Keyword :Transparency, Local Government, Local Government Official Website, Financial Disclosure, Financial Information*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan rahmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* oleh Pemerintah Daerah .”

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. M. Syafrudin, M.Si., Akt. selaku ketua Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
2. Dr. Darsono, S.E., M.B.A., Akt. selaku dosen wali atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama dari awal perkuliahan sampai sekarang.
3. Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu untuk membimbing dengan sabar, memberikan masukan dan arahan dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan Undip atas ilmu yang bermanfaat, pengetahuan baru dan motivasi selama perkuliahan.
5. Seluruh jajaran staf dan karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip yang telah banyak membantu selama penulis menempuh studi.
6. Keluarga tercinta, Bapak, Ibu dan saudara-saudariku atas doa yang selalu dipanjatkan dan motivasi yang selalu diberikan.
7. Teman-teman kelas kerja sama BPK angkatan 2013 atas kebersamaan yang telah kita jalin.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan yang terbaik dan berkat dari Tuhan YME. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, Juli 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	12
1.4 Sistematika Penelitian .....	13
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	14
2.1 Landasan Teori .....	15
2.1.1 <i>Teori Signalling</i> .....	15
2.1.2 Teori Keagenan .....	16

2.1.3	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	18
2.1.4	Pemerintahan Daerah di Indonesia.....	20
2.1.5	Manfaat Pelaporan Keuangan di Internet.....	22
2.2	Penelitian Terdahulu.....	23
2.3	Kerangka Pemikiran .....	26
2.4	Hipotesis .....	30
2.4.1	Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Tingkat Ketersediaan dan Keteraksesan IFR .....	30
2.4.2	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Ketersediaan dan Keteraksesan IFR di Internet .....	31
2.4.3	Pengaruh Rasio Kemandirian Finansial terhadap Tingkat Ketersediaan dan Keteraksesan IFR di Internet .....	33
2.4.4	Pengaruh Pendapatan Per Kapita Masyarakat terhadap Tingkat Ketersediaan dan Keteraksesan IFR di internet .....	34
2.4.5	Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Tingkat Ketersediaan dan Keteraksesan IFR di Internet.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>37</b>
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	37
3.1.1	Variabel Penelitian .....	37
3.1.2	Definisi Operasional.....	37
3.2	Populasi dan Sampel .....	41
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	42
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	42
3.5	Metode Analisis.....	43
3.5.1	Analisis Deskriptif .....	43
3.5.2	Analisis Regresi Logistik Ordinal (PLUM) .....	43
3.5.3	Analisis Regresi Linier Berganda .....	46

BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	51
4.1    Deskripsi Objek Penelitian .....	51
4.2    Analisis Data .....	52
4.2.1    Statistik Deskriptif .....	52
4.3    Uji Model Pertama (Ketersediaan).....	58
4.3.1    Regresi Logistik Ordinal (PLUM) .....	58
4.3.2    Interpretasi Hasil .....	64
4.4    Uji Model Kedua (Keteraksesan) .....	69
4.4.1    Uji Normalitas .....	69
4.4.2    Uji Multikolonieritas .....	71
4.4.3    Uji Heterokedastisitas .....	72
4.4.4    Analisis Regresi Berganda .....	72
4.4.5    Pengujian Hipotesis.....	75
4.4.6    Interpretasi Hasil .....	78
BAB V PENUTUP.....	83
5.1    Simpulan.....	83
5.2    Keterbatasan .....	85
5.3    Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	87
LAMPIRAN.....	89

## DAFTAR TABEL

	HALAMAN
TABEL 2.1 RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU .....	23
TABEL 3.1 INDEKS KETERAKSESAN IFR.....	38
TABEL 4.1 PROSES PENENTUAN SAMPEL .....	52
TABEL 4.2 STATISTIK DESKRIPTIF .....	52
TABEL 4.3 STATISTIK DESKRIPTIF OPINI .....	54
TABEL 4.4 STATISTIK DESKRIPTIF KETERSEDIAAN IFR .....	55
TABEL 4.5 SKOR KETERAKSESAN.....	56
TABEL 4.6 KRITERIA KETERAKSESAN IFR.....	57
TABEL 4.7 DESKRIPSI KATEGORI.....	59
TABEL 4.8 MODEL FIT.....	60
TABEL 4.9 PSEUDO R-SQUARE .....	61
TABEL 4.10 UJI PARALEL LINES.....	61
TABEL 4.11 UJI HIPOTESIS .....	62
TABEL 4.12 UJI KOLMOGOROV-SMIRNOV .....	70
TABEL 4.13 UJI MULTIKOLINIERITAS.....	71
TABEL 4.14 UJI GLEJSER .....	73
TABEL 4.15 ANALISIS REGRESI BERGANDA.....	74
TABEL 4.16 UJI F REGRESI .....	75
TABEL 4.17 UJI T REGRESI.....	76
TABEL 4.18 MODEL SUMMARY .....	77

## DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
GAMBAR 2.1 KERANGKA PEMIKIRAN .....	29
GAMBAR 4.1 GRAFIK NORMAL PP-PLOT .....	70
GAMBAR 4.2 GRAFIK SCATTERPLOT .....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

	HALAMAN
LAMPIRAN 1 TABULASI DATA .....	89
LAMPIRAN 2 HASIL UJI STATISTIK .....	101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 telah mempengaruhi segala aspek kehidupan tidak terkecuali pemerintah. Salah satu perubahan mendasar pasca reformasi di bidang pemerintahan adalah perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi di Indonesia ditandai dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan revisi terakhir UU No. 23 tahun 2014. Menurut Rondinelli (1983) desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, atau organisasi nonpemerintah/lembaga swadaya masyarakat.

Salah satu kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah desentralisasi fiskal yaitu pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan publik melalui APBD. Desentralisasi fiskal yang telah digulirkan oleh pemerintah bertujuan untuk mempercepat dan meratakan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengelola keuangan dan memaksimalkan potensi daerahnya untuk tujuan pembangunan. Dalam mengawal desentralisasi fiskal tersebut maka pemerintah Indonesia melakukan reformasi keuangan negara

yang ditandai dengan dikeluarkannya paket Undang-undang (UU) Keuangan Negara yakni UU No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Paket UU tersebut merupakan dasar bagi pemerintah dalam melakukan penganggaran, pelaksanaan dan pemeriksaan keuangan negara.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah telah membawa paradigma baru yang berimplikasi pada penekanan terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas dibutuhkan sebagai pengendalian dalam mencegah tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsekuensi dari *agency problem* yaitu pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal (Zimmerman, 1977). Pemerintah sebagai Agen mendapat mandat dari masyarakat sebagai prinsipal untuk menjalankan tugas pemerintahan yaitu memberikan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola dana dari masyarakat dan sumber-sumber daya yang lain. Sebagai indikator pelayanan publik yang baik, maka pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan semua penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab dan transparansi pemerintah kepada masyarakat adalah dengan menyampaikan informasi penggunaan sumber-

sumber daya dalam bentuk informasi laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan pemda ditujukan antara lain untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat (KSAP, 2005). Ryan et al. (2002) menyatakan bahwa ada dua tujuan yang diterima secara umum dari pelaporan tahunan sektor publik yaitu *accountability* (akuntabilitas) dan *decision usefulness* (pengambilan keputusan). Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Steccolini (2002) yang menyatakan bahwa laporan tahunan (laporan keuangan), meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas.

Undang-undang telah mengamanatkan setiap pemerintahan pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat yang menginformasikan kinerja keuangan pemerintah pada periode tertentu. Meskipun pemerintah telah menyampaikan laporan keuangan kepada DPR sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan, namun laporan keuangan tersebut belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu kendala mengingat jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan keuangan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan oleh pengguna,

tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial (Jones *et al.*, 1985).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat, sehingga informasi mengenai laporan keuangan pemerintah merupakan hak masyarakat dan juga sekaligus merupakan kewajiban pemerintah. Hal ini semakin didukung dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana.

Transparansi dan akuntabilitas dapat efektif apabila informasi yang disajikan relevan dan dapat diakses oleh semua pihak. Dengan demikian agar laporan keuangan dapat diakses oleh semua pihak, publikasi laporan keuangan dapat dilakukan melalui media-media yang dapat dijangkau oleh masyarakat, seperti surat kabar dan majalah. Perkembangan teknologi yang semakin canggih memungkinkan pemerintah untuk dapat menyampaikan laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak. Salah satu teknologi yang sedang berkembang pesat yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah adalah internet. Penggunaan internet untuk menyampaikan laporan keuangan melalui website dinilai cukup efektif mengingat luasnya cakupan internet dan semakin banyaknya pengguna internet. Styles dan Tennyson (2007) mengatakan bahwa internet adalah

media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangannya secara online.

Saat ini hampir semua pemda di Indonesia memiliki website sebagai wadah informasi bagi masyarakat. Media ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melaporkan laporan keuangannya kepada masyarakat luas. Pina, *et., al* (2010) menyatakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah dapat menggunakan media internet untuk menyajikan dan melakukan diseminasi laporan keuangannya. Penyampaian laporan keuangan melalui internet juga dinilai memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Bagi pemerintah, pengungkapan laporan keuangan melalui media internet dapat meningkatkan motivasi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang baik disamping dapat mengurangi biaya pelaporan yang tinggi. Hal ini dikarenakan internet dapat menjangkau masyarakat secara luas. Dengan terjangkaunya akses terhadap informasi keuangan pemerintah, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi program-program pemerintah serta menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangannya.

Penyampaian informasi keuangan melalui internet (*Internet Financial Reporting* yang disingkat menjadi IFR) merupakan cara yang murah dan efektif (*cost effective*) bagi pemda untuk menyajikan informasi tentang pengelolaan keuangan (Styles dan Tennyson, 2007), namun pemanfaatannya oleh pemerintah daerah belum maksimal. Penelitian Muhammad (2012) menunjukkan bahwa *website* pemda belum digunakan secara optimal dalam mengembangkan

pelaporan keuangan. Rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan pemda terbukti lebih rendah daripada rata-rata indeks pengungkapan informasi non keuangan (Muhammad, 2012). Selain belum maksimalnya pemanfaatan *website* sebagai media pelaporan keuangan pemerintah, terdapat keberagaman dalam ketersediaan dan keteraksesan komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal tersebut disebabkan belum adanya regulasi yang menjadi standar dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di internet.

Adanya keberagaman dalam ketersediaan dan keteraksesan antar pemerintah daerah cukup menarik untuk diteliti. Namun sejauh ini masih sedikit penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesediaan pemerintah untuk mengungkapkan informasi keuangan melalui media internet secara sukarela. Kebanyakan penelitian masih dari perspektif perusahaan privat yang berfokus pada dorongan manajemen dalam memanfaatkan internet sebagai media pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian dari perspektif sektor publik yang dilakukan oleh Laswad, *et., al* (2005) meneliti faktor *leverage*, kompetisi politik, kekayaan daerah, visibilitas pers, tipe pemerintahan, dan ukuran otoritas lokal terhadap pelaporan laporan keuangan pemerintah di internet secara sukarela. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *leverage*, kekayaan daerah, visibilitas pers, dan tipe pemerintahan memiliki pengaruh yang positif sedangkan kompetisi politik dan ukuran otoritas lokal memiliki pengaruh yang negatif. Penelitian Styles dan Tennyson (2007) menganalisis faktor-faktor seperti ukuran daerah, struktur pemerintahan, kualitas pengungkapan akuntansi, pendapatan per kapita, tingkat

utang dan kondisi keuangan kota terhadap tingkat ketersediaan dan keteraksesan laporan keuangan tahunan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota yang lebih besar memiliki kecenderungan melakukan pelaporan keuangan internet. Kota dengan pendapatan per kapita dan tingkat pengungkapan akuntansi yang lebih tinggi cenderung melakukan pelaporan keuangan di internet. Keteraksesan laporan secara positif memiliki hubungan dengan jumlah penduduk, pendapatan per kapita penduduk, tingkat utang dan kondisi keuangan pemerintah kota.

Berdasarkan penelitian Laswad, *et., al* (2005) persaingan politik yang tinggi tidak memiliki hubungan yang positif dengan IFR. Namun demikian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persaingan politik pada pemda yang mengungkapkan IFR lebih intens dibandingkan pemda yang tidak mengungkapkan IFR. Kompetisi politik yang tinggi akan meningkatkan pengawasan yang lebih ketat dari lawan politik dan masyarakat. Pemerintah yang berkuasa biasanya akan cenderung mengabaikan janji-janji politiknya pada masa kampanye. Hal ini akan menjadi perhatian pihak oposisi yang akan bersikap kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan mengawasi pemenuhan janji politik pemerintah. Dengan demikian pemerintah harus berusaha untuk meyakinkan masyarakat atas pencapaian kinerja dan pemenuhan janji politiknya. Salah satu cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk dapat meyakinkan masyarakat luas atas pencapaian kinerja dan pemenuhan janji politiknya adalah dengan menyampaikan laporan keuangan yang bisa diakses oleh masyarakat.

Adanya hubungan antara ukuran pemerintah daerah dengan pengungkapan laporan keuangan didukung oleh Robbins dan Austin (1986), Ingram dan DeJong (1987). Pemerintah yang memiliki ukuran yang besar akan berdampak pada jumlah program dan pelayanan bagi masyarakat (Giroux and Shields, 1993). Banyaknya program dan pelayanan yang diberikan akan meningkatkan penggunaan sumber daya. Lebih lanjut, ukuran pemerintah yang besar akan memiliki kompleksitas dalam pengelolaan keuangannya sehingga akan meningkatkan pengawasan oleh para *stakeholder* khususnya masyarakat. Hal tersebut akan berimplikasi pada biaya pengawasan dan pelaporan yang tinggi sehingga untuk menekan biaya monitoring yang tinggi pemerintah harus memilih media yang lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi keuangannya.

Hasil penelitian Laswad (2005) menunjukkan kekayaan asli pemerintah daerah berhubungan secara positif terhadap pengungkapan yang lebih atas informasi keuangan pada websitenya. Kekayaan besar yang dimiliki oleh pemerintah daerah mengindikasikan kinerja baik oleh pemerintah daerah. Hal tersebut dapat menunjukkan kemandirian finansial pemerintah daerah dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian semakin besar kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka kecenderungan untuk mengungkapkan informasi keuangannya akan semakin besar.

Giroux dan Deis (1993, p.68) melaporkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara pendapatan per kapita suatu daerah dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan. Ingram (1984) dan Giroux and McLelland

(2003) mengungkapkan bahwa daerah dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi memiliki permintaan atas akuntabilitas yang lebih tinggi. Masyarakat dengan pendapatan per kapita yang tinggi memiliki kecenderungan untuk mengawasi pengelolaan kekayaan pemerintah. Pengawasan yang tinggi dari masyarakat tentunya akan menimbulkan biaya monitoring yang tinggi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Melalui publikasi informasi keuangan di internet, pemerintah dapat meminimalisir biaya tersebut.

Opini audit merupakan salah satu indikator kualitas laporan keuangan pemerintah. Pemerintahan yang memiliki opini audit yang baik akan cenderung melakukan publikasi laporan keuangan kepada publik. Sebaliknya opini audit yang kurang baik dapat memunculkan persepsi yang negatif dari masyarakat terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, adanya fenomena heterogenitas pada ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan pemerintah di internet dan masih sedikitnya penelitian yang menganalisis pelaporan keuangan di internet secara sukarela di internet oleh pemerintah, merupakan alasan peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketersediaan dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* (IFR) oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Laswad., dkk (2005) dan Styles and Tennyson (2007). Penelitian ini menggunakan variabel kompetisi politik, ukuran pemda, rasio kemandirian finansial, pendapatan per kapita masyarakat dan opini audit sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada

pengukuran variabel dependennya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Styles dan Tennyson (2007), variabel ketersediaan diukur dengan menggunakan skala nominal yaitu variabel dummy, sedangkan dalam penelitian ini, variabel ketersediaan diukur dengan menggunakan skala ordinal untuk dapat menjelaskan keberagaman dalam ketersediaan informasi keuangan oleh Pemda.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adanya hubungan agen-prinsipal antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu alasan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Pengungkapan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas yang dapat digunakan oleh pemerintah. Laporan keuangan seharusnya dapat diakses oleh masyarakat ternyata belum maksimal. Media internet merupakan salah satu cara yang paling efektif dan efisien dalam menyampaikan laporan keuangan. Internet diharapkan dapat mengatasi permasalahan akses atas laporan keuangan pemerintah. Namun saat ini, tidak semua pemerintah daerah memaksimalkan internet dalam media penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah persaingan politik suatu daerah mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah?
2. Apakah persaingan politik suatu daerah mempunyai pengaruh positif terhadap keteraksesan IFR oleh pemerintah daerah?

3. Apakah ukuran daerah mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah?
4. Apakah ukuran daerah mempunyai pengaruh positif terhadap keteraksesan IFR oleh pemerintah daerah?
5. Apakah rasio kemandirian finansial mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah?
6. Apakah rasio kemandirian finansial mempunyai pengaruh positif terhadap keteraksesan IFR oleh pemerintah daerah?
7. Apakah pendapatan per kapita masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah?
8. Apakah pendapatan per kapita masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap keteraksesan IFR oleh pemerintah daerah?
9. Apakah opini audit mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat ketersediaan pemerintah daerah?
10. Apakah opini audit mempunyai pengaruh positif terhadap keteraksesan IFR oleh pemerintah daerah?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari kompetisi politik terhadap tingkat ketersediaan dan keteraksesan IFR oleh pemerintah daerah

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat ketersediaan dan keteraksesan IFR oleh pemerintah daerah
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh rasio kemandirian finansial terhadap tingkat ketersediaan dan keteraksesan IFR oleh pemerintah daerah
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari pendapatan per kapita masyarakat terhadap tingkat ketersediaan dan keteraksesan IFR oleh pemerintah daerah
5. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh opini audit terhadap tingkat ketersediaan dan keteraksesan IFR oleh pemerintah daerah

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Pemerintah Daerah  
Dapat menjadi masukan dan motivasi dalam menyampaikan laporan keuangan secara efektif dan efisien melalui internet.
2. Bagi Pemerintah Pusat  
Sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan standar pelaporan keuangan melalui media internet.
3. Bagi Pemakai Laporan Keuangan  
Pemakai laporan keuangan khususnya masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengakses laporan keuangan dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara/daerah.

#### 4. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menambah referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut atas faktor-faktor yang mempengaruhi penyampaian laporan keuangan pemerintah di internet secara sukarela.

### 1.4 Sistematika Penelitian

Dalam skripsi ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab. Antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

#### BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan secara singkat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

#### BAB II. TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yang melandasi penelitian yaitu tentang teori *signalling*, teori keagenan (*agency theory*), laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintahan di Indonesia, manfaat pelaporan keuangan di internet, rangkuman penelitian terdahulu dan hipotesis-hipotesis.

#### BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi variabel penelitian,

definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

#### BAB IV. HASIL DAN ANALISIS

Bagian ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah yang ingin diteliti melalui deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi data.

#### BAB V. PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi ulasan pembahasan penelitian sesuai dengan pembahasan pada bab IV sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori *Signalling***

Dari perspektif privat, teori *signalling* menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan *stakeholder* di luar perusahaan seperti investor. Informasi yang disampaikan oleh perusahaan merupakan unsur yang penting dalam memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan sekarang dan prediksi kondisi keuangan di masa yang akan datang. Informasi yang disampaikan oleh perusahaan haruslah informasi yang relevan dan akurat sehingga dapat diandalkan oleh *stakeholder*.

Dari perspektif publik, teori *signalling* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat oleh masyarakat berkeinginan menunjukkan sinyal yang baik kepada masyarakat. Pemerintah mendapat tekanan dari masyarakat untuk memberikan informasi mengenai kinerja dan pencapaian-pencapaian pemerintah. Teori *signalling* dapat membantu pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal) dalam mengurangi asimetri informasi. Pemerintah dapat mengurangi asimetri informasi dengan cara memberikan sinyal kepada masyarakat melalui pengungkapan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern dan pengungkapan yang lebih lengkap.

Dalam kerangka teori sinyal disebutkan bahwa dorongan untuk memberikan informasi adalah karena adanya asimetri informasi antara pemda

dengan pihak luar, khususnya masyarakat. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat berupa informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya. Internet merupakan media yang paling efektif bagi pemda untuk menunjukkan sinyal positif kepada masyarakat. Pemda akan berusaha melakukan pelaporan keuangan melalui *website* secara lebih optimal untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat (Puspita dan Martani, 2012). Masyarakat juga dapat dengan mudah dan cepat mengakses informasi keuangan terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi.

### **2.1.2 Teori Keagenan**

Dalam Teori keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan yaitu hubungan yang muncul ketika satu pihak (*principal*) memberikan/mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan pengambilan keputusan. Lupia & McCubbins (2000) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (agen) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Hal ini dapat dilihat juga dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Banker dan Paxton (1987) mengatakan hubungan antara pimpinan pemerintahan/politikus dengan masyarakat/pemilih dapat disebut sebagai hubungan agensi. Pada pemerintahan di Indonesia, pemda bertindak sebagai *agent* yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kepentingan masyarakat selaku *principal*. Masyarakat selaku *principal* memberikan amanat

kepada pemda untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Pemda selaku *agent* mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat. Hasil pelaksanaan pemerintahan terkait dengan penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan masyarakat sebagai prinsipal adalah dalam bentuk laporan keuangan.

Adanya hubungan keagenan dapat memunculkan *agency problem* berupa asimetri informasi. Pemerintah sebagai pihak yang memegang informasi lebih banyak akan cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa persetujuan masyarakat, sehingga terkadang masyarakat menerima informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengawasi seluruh tindakan dan keputusan yang dibuat oleh pemda. Adanya permasalahan asimetri informasi akan memunculkan apa yang disebut sebagai *agency cost* (biaya keagenan) yang harus ditanggung oleh pemerintah sebagai usaha untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Biaya keagenan yang timbul akibat adanya asimetri informasi oleh Meckling (1976) dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Monitoring Cost*, yaitu biaya yang timbul untuk mengawasi perilaku *agent*.
2. *Bonding Cost*, yaitu biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa ia akan bertindak untuk kepentingan *principal*.

3. *Residual Loss*, yaitu nilai kerugian yang dialami *principal* akibat keputusan yang diambil oleh *agent* yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh *principal*.

Transparansi informasi dari pemda sangat diperlukan untuk meningkatkan hubungan antara pemda dan masyarakat, serta mengurangi konflik kepentingan. Menurut Bertot dkk., (dalam Sinaga dan Prabowo, 2011) dengan kemudahan mendapatkan informasi tentang pemerintah, seperti halnya publikasi laporan keuangan melalui internet, maka dapat meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Publikasi laporan keuangan pemda melalui internet juga dapat mengurangi *monitoring cost* yang harus dikeluarkan oleh *principal* dan *agent*. Melalui internet pemerintah dapat melaporkan informasinya kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan dengan efektif dan efisien, sehingga masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dimana saja dan kapan saja.

### **2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemda, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang harus disajikan dalam LRA sekurang-kurangnya terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintahan daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos-pos dalam neraca sekurang-kurangnya meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, neraca, dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

#### **2.1.4 Pemerintahan Daerah di Indonesia**

Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Perubahan tersebut ditandai dengan lahirnya Undang –Undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan yang terakhir UU No.23 Tahun 2014. Pokok dari undang-undang tersebut adalah mengatur pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk dapat mandiri dalam mengelola daerahnya. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah provinsi terbagi atas daerah kota dan daerah kabupaten. Setiap daerah provinsi, daerah kota, dan daerah kabupaten mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah

daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah. Tiap pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala daerah. Sebutan kepala daerah untuk pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten, masing-masing ialah gubernur, walikota, dan bupati.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 dinyatakan bahwa, kepala daerah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Ditegaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan langsung kepala daerah (pilkada). Prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah sekarang ini, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota lebih menggambarkan pelaksanaan demokrasi. Pilkada dilaksanakan secara langsung, terbuka kemungkinan bagi calon independen/nonparpol untuk maju melalui partai politik (parpol)/gabungan parpol, dan proses penyaringan bakal calon dilaksanakan

secara terbuka dengan mewajibkan tiap parpol/gabungan parpol mengemukakan proses dan hasil penyaringan kepada masyarakat.

### **2.1.5 Manfaat Pelaporan Keuangan di Internet**

Laporan keuangan dan anggaran pemerintah merupakan dokumen yang penting dalam memberikan informasi kepada para stakeholder terkait proses penganggaran dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Untuk memenuhi hal tersebut, laporan keuangan haruslah tersedia dan dapat dengan mudah diakses oleh *stakeholder*. Styles dan Tennyson (2007) mengungkapkan penggunaan internet merupakan cara yang paling *cost effective* dalam menyebarkan informasi bagi para *stakeholder*.

Menurut *Government Financial Officer's Association* (GFOA) penggunaan internet dalam mengakses informasi laporan keuangan dan anggaran dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Meningkatkan perhatian pemerintah terhadap dokumen-dokumen laporan keuangan dan anggaran.

Pemerintah akan menjadi lebih teliti dan hati-hati dalam menyusun laporan keuangan dan anggaran karena akses yang terbuka memungkinkan semua pihak dapat mengaksesnya.

2. Dapat memberikan kemudahan dalam melakukan analisis.

Informasi laporan keuangan dan anggaran dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

3. Menghemat biaya publikasi karena internet dapat menjangkau lebih banyak orang.

#### 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat

Masyarakat dapat memonitor kinerja keuangan pemerintah dengan mudah melalui laporan keuangan yang tersedia di internet.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi IFR masih terbatas pada sektor privat. Hanya sedikit penelitian yang dilakukan pada sektor pemerintahan. Beberapa penelitian pada sektor pemerintahan dilakukan oleh Laswad, *et al.*, (2005) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi IFR secara sukarela oleh pemda di New Zealand, Styles dan Tennyson (2007) yang menganalisis faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan keteraksesan IFR pada pemerintah daerah di Amerika Serikat dan penelitian Ratmono (2013) yang meneliti pelaporan keuangan di internet pada pemda yang ada di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Laswad, *et al.*, (2005), Styles dan Tennyson (2007) dan Dwi Ratmono (2013) dirangkum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**

### Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Laswad, Fisher dan Oyelere (2005)	<i>Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government</i>	<b>Variabel Dependen:</b> Kompetisi Politik, Ukuran, <i>Leverage</i> , Kekayaan Pemerintah Daerah, Visibilitas Pers, Tipe <i>Council</i>	1. <i>Leverage</i> , Kekayaan Pemerintah Daerah, Visibilitas Pers memiliki hubungan positif

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
		<i>Authorities</i>	<b>Variabel Independen:</b> Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah	dengan praktik IFR\ Tipe <i>Council</i> berhubungan negatif dengan IFR 2. Hubungan positif antara praktik IFR dengan kompetisi politik dan ukuran tidak didukung
2	Styles dan Tennyson (2007)	Memeriksa keberadaan dan aksesibilitas pelaporan keuangan pemerintah kota US di internet serta mengidentifikasi variabel yang berhubungan dengan praktik laporan pelaporan keuangan pemerintah kota di internet	<b>Variabel Dependen:</b> Model 1 : Laporan keuangan tahunan komprehensif yang terdapat di internet  Model 2: Nilai indeks aksesibilitas  <b>Variabel Independen:</b> Model 1: ukuran, struktur pemerintahan, sertifikasi pelaporan, pendapatan  Model 2: ukuran, struktur pemerintahan, sertifikasi pelaporan, pendapatan, kondisi keuangan kota, utang	1. Kota yang lebih besar memiliki kecenderungan melakukan pelaporan keuangan internet. Kota dengan pendapatan per kapita dan tingkat pengungkapan akuntansi yang lebih tinggi cenderung melakukan pelaporan keuangan di internet. 2. Aksesibilitas data keuangan di internet secara positif berhubungan dengan jumlah penduduk, pendapatan per kapita penduduk,

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
				tingkat utang, posisi keuangan kota, serta kualitas pelaporan keuangan
3	Ratmono (2013)	Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan	<p><b>Variabel Dependen:</b> Tingkat Ketersediaan dan Keteraksesan IFR pada Pemda</p> <p><b>Variabel Independen:</b> Ukuran Pemda, Hutang Pemda, Kekayaan Pemda, Urbanisasi Pemda, Ketergantungan Finansial, Jenis Opini BPK, Belanja Pemda</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel ukuran pemda dan opini BPK berhubungan secara negatif terhadap tingkat ketersediaan IFR pada Pemda, variabel hutang pemda, kekayaan pemda, urbanisasi pemda, ketergantungan finansial pemda memiliki hubungan positif tidak signifikan terhadap tingkat ketersediaan IFR pada Pemda</li> <li>2. Variabel tingkat ketergantungan finansial memiliki hubungan positif signifikan terhadap tingkat keteraksesan IFR Pemda</li> <li>3. Variabel tingkat</li> </ol>

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
				ketersediaan IFR berpengaruh signifikan terhadap tingkat keteraksesan IFR Pemda

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen mendapat mandat dari masyarakat sebagai prinsipal untuk menjalankan tugas pemerintahan yaitu memberikan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menggunakan dan mengelola sumber-sumber daya yang ada. Penggunaan sumber-sumber daya tersebut nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Adanya hubungan teori keagenan tersebut memunculkan permasalahan berupa asimetri informasi. Transparansi dan akuntabilitas merupakan cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan asimetri informasi tersebut.

Laswad, *et. al* (2005) menyebutkan akuntabilitas dapat diwujudkan oleh pemerintah dengan cara mengkomunikasikan proses perencanaan, publikasi dan diseminasi rencana tahunan dan laporan keuangan, implementasi strategi dalam mencapai rencana jangka panjang dan rencana penerbitan utang dan investasi oleh pemerintah. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban

pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Styles dan Tennyson, (2007) mengungkapkan penyusunan laporan keuangan merupakan satu dari bentuk akuntabilitas, tetapi akses terhadap laporan keuangan merupakan bagian lain dari akuntabilitas yang harus diperhatikan.

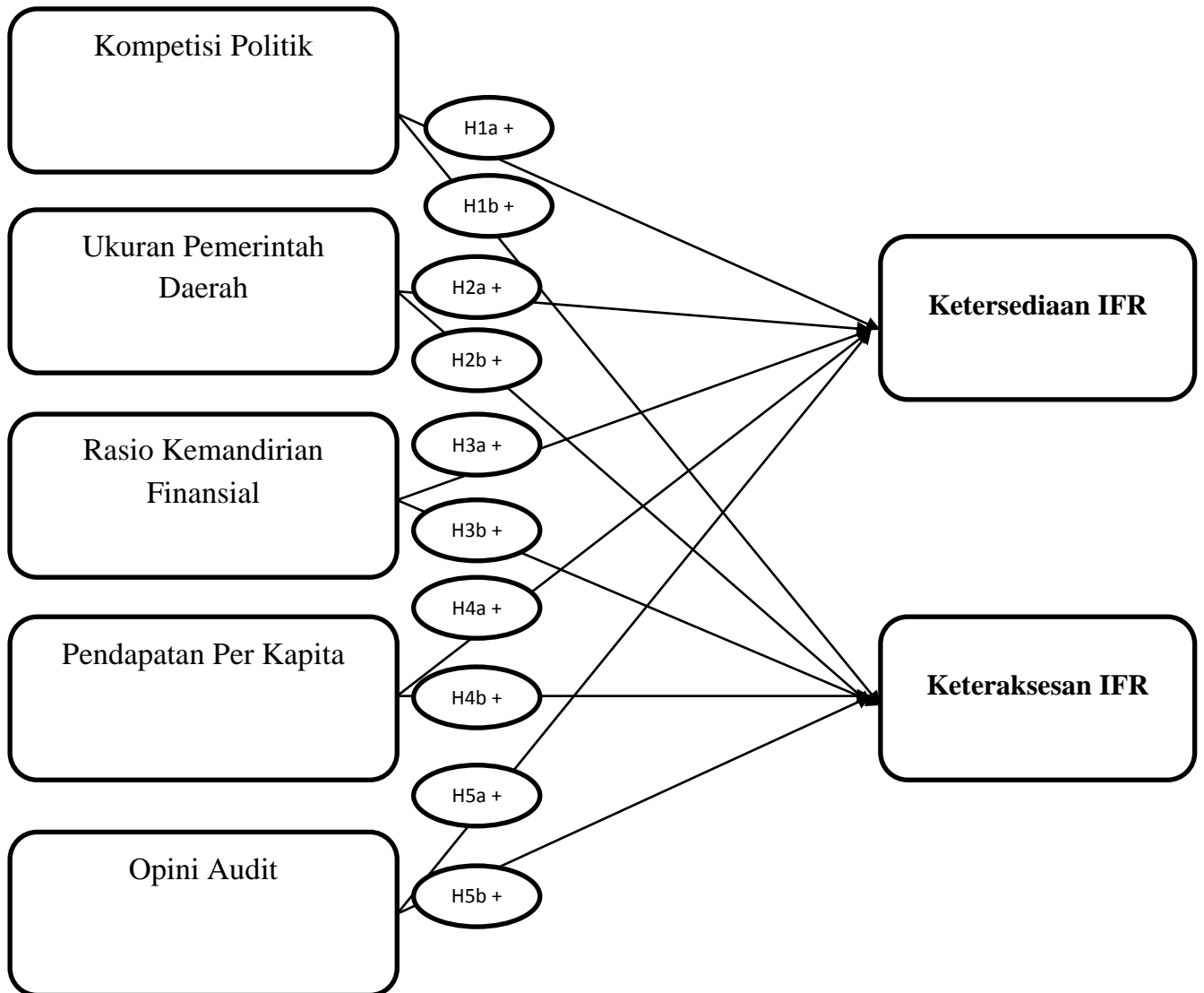
Banyak cara dan metode yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyampaikan informasi keuangannya kepada masyarakat. Salah satu cara tersebut adalah dengan memanfaatkan internet sebagai media teknologi yang berkembang dengan pesat. Styles dan Tennyson (2007) mengungkapkan bahwa internet adalah media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangannya secara online. Penyampaian laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat juga menunjukkan sinyal adanya praktik manajemen yang baik dari pemerintah.

Namun berdasarkan penelitian Muhammad (2012) menunjukkan bahwa *website* pemda belum digunakan secara optimal dalam mengembangkan pelaporan keuangan. Pemerintah belum memanfaatkan internet dengan optimal dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya akses masyarakat terhadap laporan keuangan pemerintah. Mengingat pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam menjamin pengelolaan keuangan yang sehat oleh pemerintah, maka penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan keteraksesan IFR oleh pemerintah daerah.

Merujuk penelitian yang dilakukan oleh Laswad, dkk (2005), Styles dan Tennyson (2007) dan Ratmono (2013), penelitian ini akan menguji hubungan

faktor-faktor seperti kompetisi politik, ukuran pemda, tingkat kemandirian finansial, pendapatan per kapita masyarakat, dan opini audit terhadap IFR oleh pemda yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian Styles dan Tennyson (2007) menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan melalui IFR dapat terdiri dari tiga dokumen yang berbeda yaitu: (i) hanya anggaran (*budget*) saja, (ii) hanya *Comprehensive Annual Financial Report (CAFR)* saja dan (iii) anggaran dan CAFR kedua-duanya. Tingkat ketersediaan IFR menunjukkan sampai sejauh mana dokumen-dokumen laporan keuangan tersedia/disajikan secara online (Styles dan Tennyson, 2007). Sedangkan tingkat keteraksesan IFR menunjukkan tingkat kemudahan pengguna dapat menemukan dan melihat laporan keuangan di website pemda (Styles dan Tennyson, 2007).

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **2.4 Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Tingkat Ketersediaan dan Keteraksesan IFR oleh Pemda**

Kepala daerah mempunyai potensi untuk tidak terpilih kembali pada pemilihan berikutnya sehingga pemerintah daerah akan berusaha untuk mengurangi perselisihan dengan masyarakat (Zimmerman, 1997). Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah sangat dipengaruhi oleh isu yang berkembang dan pemberitaan-pemberitaan media. Lawan politik pemerintah yang berkuasa akan selalu kritis terhadap kebijakan yang dibuat. Mereka juga akan memantau pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Hal itu mengakibatkan pemda yang berkompetisi politik tinggi menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang lebih tinggi dengan memberikan informasi lebih lanjut yang menunjukkan pemenuhan janji mereka sebelum pemilu (Baber dalam Laswad dkk., 2005). Internet merupakan media yang paling efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi secara instan dan simultan sehingga dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan kewajiban pemerintah.

Lebih lanjut, Baber dan Sen (1984) berpendapat bahwa kompetisi politik sebagai alat yang dapat digunakan oleh rival politik untuk menyerang pemerintah yang berkuasa atas praktik manajemen yang tidak bertanggung jawab dan oleh sebab itu dapat mendorong pemerintah untuk konsisten dengan kebijakan yang telah dibuat sebagai komitmen dalam mewujudkan manajemen yang efisien melalui pelaporan yang tepat. Securities and Exchange Commission (SEC) telah menyatakan bahwa karena investor memiliki akses yang lebih luas dalam

menggunakan internet, komisi akan mempertimbangkan mendorong penggunaan internet sebagai alat penyebaran utama (SEC, 2001). Oleh sebab itu, penggunaan internet secara sukarela dalam upaya penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah menunjukkan upaya pemerintah untuk menyampaikan praktik pelaporan keuangan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H1 a: Kompetisi politik mempunyai pengaruh positif terhadap ketersediaan IFR oleh Pemda**

**H1 b: Kompetisi politik mempunyai pengaruh positif terhadap ketersaksesan IFR oleh Pemda**

#### **2.4.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Ketersediaan dan Keteraksesan IFR oleh Pemda**

Secara umum, semakin besar suatu kota maka akan semakin banyak program dan pelayanan kepada masyarakat yang harus dikerjakan dan akan semakin banyak pula sumber daya yang digunakan (Giroux and Shields, 1993; Giroux and McLelland, 2003). Dengan kata lain penggunaan sumber daya yang banyak akan meningkatkan pengawasan oleh masyarakat. Untuk dapat memaksimalkan pengawasan dari masyarakat pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Pengungkapan laporan keuangan merupakan salah satu cara dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Adanya kebutuhan yang besar dalam pengungkapan laporan keuangan oleh pemerintah maka diharapkan pemerintah dapat mengadopsi berbagai metode untuk pengungkapan tersebut. Internet merupakan media yang efisien dan memuaskan yang dapat digunakan oleh pemerintah yang memiliki ukuran yang besar dalam menyampaikan laporan keuangannya secara sukarela dibandingkan dengan cara tradisional dengan mengkopi laporan keuangan yang banyak, oleh sebab itu biaya yang digunakan untuk menyampaikan laporan keuangan di internet sangat tergantung dari ukuran suatu pemerintahan (Ettredge et al., 2002; Pirchegger and Wagenhofer, 1999). Begitu juga Akibatnya, manfaat dari pengungkapan melalui internet cenderung akan meningkat dengan ukuran (Debrecey, dkk 2002; Pirchegger dan Wagenhofer, 1999 dalam Laswad, dkk 2005).

Semakin besar suatu pemerintahan maka akan semakin banyak pelayanan dan fungsi yang akan dijalankan. Hal tersebut berdampak pada semakin canggih dan kompleksnya website yang dimiliki oleh pemerintah (Styles and Tennyson, 2007). Dengan semakin canggihnya website yang dimiliki oleh pemerintah maka pemerintah dapat memanfaatkan agar informasi keuangan dapat diakses dengan mudah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H2 a: Ukuran Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap ketersediaan IFR oleh Pemda**

## **H2 b: Ukuran Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap keteraksesan IFR oleh Pemda**

### **2.4.3 Pengaruh Rasio Kemandirian Finansial terhadap Tingkat Ketersediaan dan Keteraksesan IFR oleh Pemda**

Berdasarkan penelitian Laswad, dkk (2005) besarnya kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan daerah menunjukkan kinerja pemerintah yang baik. Kinerja pemerintah yang baik merupakan indikasi manajemen pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang memiliki manajemen yang baik akan mempunyai kecenderungan untuk mengungkapkan informasi keuangannya. Hal tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa pemerintah telah menjalankan amanat rakyat dan meningkatkan peluang untuk memenangkan pemilihan di masa yang akan datang.

Christiaens (1999) berpendapat bahwa kekayaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah berhubungan positif dengan pengungkapan karena hal tersebut merupakan sinyal atas manajemen pemerintahan yang baik. Kemandirian daerah yang tinggi dapat ditunjukkan dengan tingginya rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Sedangkan, pemerintahan yang memiliki rasio pendapatan asli daerah yang rendah menunjukkan kinerja pemerintahan yang kurang baik. Hal ini dapat mengurangi dorongan pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat atas informasi keuangannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H3 a: Kemandirian Finansial pemda mempunyai pengaruh positif terhadap ketersediaan IFR oleh Pemda**

**H3 b: Kemandirian Finansial pemda mempunyai pengaruh positif terhadap keteraksesan IFR oleh Pemda**

#### **2.4.4 Pengaruh Pendapatan per kapita masyarakat terhadap tingkat ketersediaan dan keteraksesan IFR oleh Pemda**

Daerah dengan masyarakat yang memiliki pendapatan besar akan meningkatkan kebutuhan akan akuntabilitas oleh pemerintah (Ingram, 1983). Daerah dengan masyarakat yang memiliki pendapatan besar akan memiliki tingkat pengawasan politik yang tinggi oleh masyarakat dan akan meningkatkan permintaan atas informasi kinerja pemerintah (Styles and Tennyson, 2007). Pendapatan per kapita merupakan gambaran dari tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Hal ini juga dapat digunakan sebagai ukuran dari tingkat produktivitas masyarakat.

Semakin tinggi pendapatan masyarakat dalam suatu daerah maka semakin tinggi pula kemampuan dalam mengadopsi teknologi untuk mendapatkan informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, masyarakat memanfaatkan internet sebagai media untuk mendapatkan informasi. Hal tersebut mendorong pemerintah menyediakan informasi keuangan melalui internet. Semakin besar permintaan atas akuntabilitas dan semakin banyak masyarakat dengan pendapatan besar akan berpengaruh positif terhadap tingkat keteraksesan informasi keuangan pada internet yang disediakan oleh pemerintah (Styles and Tennyson, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H4 a: Pendapatan per kapita masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap ketersediaan IFR oleh Pemda**

**H4 b: Pendapatan per kapita masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap keteraksesan IFR oleh Pemda**

#### **2.4.5 Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Tingkat Ketersediaan dan Keteraksesan IFR oleh Pemda**

Menurut UU No.15 Tahun 2004 tentang Permeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun jenis opini audit antara lain Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (*Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian/WP (*Qualified Opinion*), Tidak Wajar/TW (*Adverse Opinion*), dan Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (*Disclaimer of Opinion*). Opini auditor dinilai sebagai refleksi dari kualitas laporan keuangan. Opini WTP diberikan kepada entitas dengan laporan keuangan yang baik dan bebas dari salah saji material. Sedangkan opini TMP diberikan apabila terdapat pembatasan ruang lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak memperoleh bukti yang cukup sebagai dasar pemberian opini.

Styles and Tennyson (2007) berpendapat bahwa pemda yang mendapat penghargaan dari organisasi eksternal atas praktek pelaporan keuangan yang baik, cenderung untuk menyajikan laporan keuangannya di internet. Bentuk

penghargaan yang diterima pemerintah daerah atas keberhasilannya dalam menyajikan laporan keuangan yang baik dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh BPK. Opini WTP yang diperoleh pemda diharapkan dapat mendorong pemda untuk mengungkap laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H5 a: Opini Audit mempunyai pengaruh positif terhadap ketersediaan IFR oleh Pemda**

**H5 b: Opini Audit mempunyai pengaruh positif terhadap keteraksesan IFR oleh Pemda**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan enam variabel penelitian yang terdiri dari lima variabel independen dan dua variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketersediaan dan keteraksesan IFR oleh pemerintah daerah. Variabel Independen dalam penelitian ini antara lain: kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, kekayaan pemerintah daerah dan opini audit.

##### **3.1.2 Definisi Operasional**

###### **3.1.2.1 Variabel Dependen**

###### **Ketersediaan dan keteraksesan IFR di Internet**

Styles dan Tennyson, (2007) mengungkapkan penyusunan laporan keuangan merupakan satu dari bentuk akuntabilitas, tetapi akses terhadap laporan keuangan merupakan bagian lain dari akuntabilitas yang harus diperhatikan. Lebih lanjut penelitian ini akan menganalisis pengungkapan laporan keuangan pemerintah secara sukarela di internet dengan berfokus pada dua aspek yaitu aspek ketersediaan informasi keuangan dan aspek keteraksesan informasi keuangan. Berdasarkan penelitian Styles and Tennyson (2007) variabel dependen yang dipakai dalam penelitian ini adalah ketersediaan dan keteraksesan IFR oleh pemerintah daerah.

### 1. Tingkat Ketersediaan IFR

Tingkat ketersediaan IFR didefinisikan sebagai tingkat ketersediaan dokumen-dokumen laporan keuangan secara online di website pemda (Styles dan Tennyson, 2007). Berdasarkan Styles dan Tennyson (2007), variabel ketersediaan diukur dengan menggunakan skala ordinal (2=jika terdapat dokumen LKPD secara lengkap di website pemda, 1=jika hanya terdapat dokumen APBD, 0=jika tidak terdapat dokumen LKPD atau APBD sama sekali. Namun karena terbatasnya pemda yang mengungkapkan secara lengkap keseluruhan item laporan keuangan maka, model untuk ketersediaan IFR dimodifikasi yaitu, 2=jika terdapat dokumen LKPD secara lengkap di website pemda, 1=jika terdapat salah satu dari komponen LKPD atau dokumen APBD dan 0=jika tidak terdapat informasi keuangan baik LKPD maupun dokumen APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005, LKPD terdiri dari empat komponen, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

### 2. Tingkat Keteraksesan IFR

Tingkat keteraksesan IFR didefinisikan sebagai tingkat kemudahan pengguna dapat menemukan dan melihat laporan keuangan di *website* pemda (Styles dan Tennyson, 2007). Tingkat keteraksesan IFR diukur dengan menggunakan indeks yang dikembangkan oleh Styles dan Tennyson (2007).

**Tabel 3.1**  
**Indeks Keteraksesan IFR**

<b>Skor</b>	<b>Syarat</b>
+1	<b>Jika Website Pemda dapat ditemukan pada halaman pertama pencarian google dengan mengetik nama pemda</b>
+1	<b>Jika hanya diperlukan tiga kali klik atau kurang untuk melihat IFR dalam website Pemda</b>
+1	<b>Jika data IFR dapat diunduh dalam format PDF atau HTML</b>
+1	<b>Jika terdapat IFR tahun sebelumnya dalam website pemda</b>
+1	<b>Jika terdapat link data informasi keuangan (LKPD/APBD)</b>
+1	<b>Jika terdapat search engine untuk melakukan pencarian informasi keuangan</b>
+5	<b>Jika terdapat komponen LKPD (Neraca, LRA, LAK dan CALK) dan APBD</b>
+1	<b>Jika terdapat informasi kontak (telepon/fax/email) untuk mendapatkan data informasi keuangan.</b>

Sumber: Styles (2007), dengan modifikasi

### 3.1.2.2 Variabel Dependen

#### 3.1.2.2.1 Kompetisi Politik (POLCOMP)

Dalam penelitian Laswad, dkk (2005) yang dilakukan di Selandia Baru, rasio antara jumlah kandidat dengan jumlah posisi yang tersedia digunakan sebagai proxy untuk kompetisi politik. Penelitian ini menilai kompetisi politik dengan menggunakan pengukuran yang sama dengan pengukuran dalam

penelitian Laswad, dkk (2005) dengan menyesuaikan kondisi yang ada di Indonesia yaitu hanya satu orang yang dipilih menjadi pemimpin daerah. Kompetisi politik diukur dengan melihat jumlah kandidat kepala daerah pada pemilihan kepala daerah terakhir.

#### **3.1.2.2.2 Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE)**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Laswad, *et al.*, (2005), proxy yang digunakan untuk menilai ukuran pemerintah daerah adalah aset pemda dan pendapatan asli daerah (PAD). Aset dapat merepresentasikan ukuran besar kecilnya suatu pemerintah daerah dan PAD dapat menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik.

#### **3.1.2.2.3 Kemandirian Finansial Pemda (INDEP)**

Kemandirian finansial pemda mengindikasikan sejauh mana pemda tidak bergantung pada pemerintah pusat. Kemandirian finansial pemda dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah terhadap jumlah pendapatan pemda.

$$\text{Indep} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Pendapatan}}$$

#### **3.1.2.2.4 Pendapatan Per Kapita Masyarakat (INCOME)**

Styles dan Tennyson (2007) menggunakan pendapatan per kapita sebagai faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan keteraksesan data keuangan oleh pemda di Amerika Serikat. Styles dan Tennyson (2007) juga menemukan semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu daerah maka semakin tinggi kecenderungan pemerintah untuk menyampaikan informasi keuangannya pada website.

Pendapatan perkapita yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita. Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut.

#### **3.1.2.2.5 Opini Audit**

Opini audit merupakan refleksi dari kualitas laporan keuangan. Proxy yang digunakan adalah opini yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu jika pemerintah daerah menerima opini WTP maka diberi nilai satu sedangkan pemerintah daerah yang menerima opini selain WTP diberi nilai 0.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah pemerintahan kota dan kabupaten yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar. Selain memiliki jumlah penduduk terbesar hampir sebagian besar pengguna internet berada di Pulau Jawa. Hal tersebut merupakan pertimbangan peneliti untuk menjadikan Pulau Jawa sebagai populasi dalam penelitian ini. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampel bertujuan (*purposive sampling*) dengan ketentuan pemda memiliki semua kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Kriteria yang ditetapkan ialah :

1. Pemerintahan daerah telah memiliki laporan keuangan *audited* oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun 2012 serta laporan keuangan tersebut dapat diperoleh di BPK

2. Pemerintahan daerah memiliki situs resmi di internet
3. Data pemerintahan daerah berupa jumlah kandidat kepala daerah dapat diperoleh di Komisi Pemilihan Umum.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, melalui media perantara. Data sekunder tersebut berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Variabel independen menggunakan data yang tersedia pada laporan keuangan pemerintah daerah 2012.

Data variabel dependen, yaitu tingkat pengungkapan informasi akuntansi yang terdiri dari tingkat ketersediaan IFR dan keteraksesan IFR oleh pemerintah daerah, diperoleh dengan mengamati langsung pada situs resmi pemerintah daerah. Alamat situs resmi pemerintah daerah didapat dari [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id). Untuk data non keuangan, seperti data untuk variabel kompetisi politik diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum. Data berupa pendapatan perkapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumentasi. Data-data dan teori dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, artikel, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan landasan teori. Data juga diperoleh dari studi dokumentasi

yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder baik dari lembaga yang mengeluarkan data tersebut maupun dari *internet*.

### **3.5 Metode Analisis**

#### **3.5.1 Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif digunakan untuk menghasilkan gambaran dari data yang telah terkumpul. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2005).

#### **3.5.2 Analisis Regresi Logistik Ordinal (PLUM)**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi logistik ordinal atau PLUM (Polytomous Universal Model). Regresi logistik ordinal bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Regresi logistik ordinal adalah perluasan dari multinomial logistik regresi, yaitu regresi yang dipakai jika variabel dependen berupa kategori ordinal (peringkat). Penelitian ini akan menguji model pertama yaitu tingkat ketersediaan IFR dengan variabel dependen yang bersifat ordinal dengan range nilai 0-2. Peringkat pertama yaitu dengan skala ordinal 0 dikategorikan IFR tidak tersedia, peringkat kedua dengan skala ordinal 1 dikategorikan terdapat salah satu LKPD atau dokumen APBD pada website dan peringkat ketiga dengan skala ordinal 3 dikategorikan IFR tersedia dan lengkap.

Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

Model 1

$$\text{Logit(KETERSEDIAAN)} = \beta_0 + \beta_1 \text{Polcomp} + \beta_2 \text{Size} + \beta_3 \text{Indep} + \beta_4 + \beta_5 \text{Opini}$$

Dimana:

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$	=	Variabel Penelitian
Polcomp	=	Kompetisi Politik
Size	=	Ukuran Pemerintah Daerah
<i>Indep</i>	=	Kemandirian Finansial Pemda
<i>Income</i>	=	Pendapatan per kapita Masyarakat
<i>Audit Opinion</i>	=	Variaebel <i>dummy</i> jenis opini (kode 1 untuk opini WTP dan 0 untuk opini selain WTP)

Tahapan pengujian PLUM adalah sebagai berikut:

### 3.5.2.1 Case Processing Summary

*Case Processing Summary* menyajikan ringkasa data atau kasus yang dianalisis. Pada tabel case processing summary, kita dapat melihat seberapa banyak data yang berada pada kategori rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Selain itu dengan melihat tabel case processing summary dapat juga dilihat berapa jumlah data yang valid.

### 3.5.3.2 Menilai Model Fit

Menilai model fit pada PLUM dapat dilakukan dengan melihat tabel model fitting informatif. Model fit ditentukan dengan melihat tabel model fitting informatif dan membandingkan nilai -2 log likelihood pada intercept dengan nilai final (nilai setelah dimasukkan variabel independen ke dalam model serta melihat

nilai signifikansi). Model fit jika nilai 2 log likelihood pada final lebih besar dibandingkan dengan nilai intercept dan nilai signifikansi  $< 5\%$ . Jika hal ini terpenuhi berarti model dengan dimasukkan variabel independen, lebih baik dibandingkan hanya model dengan intercept saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa model fit.

### **3.5.2.3 Pseudo R-Square**

Pseudo R-Square pada PLUM, intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pseudo R-Square mirip koefisien determinasi pada regresi linier. Nilai koefisien Pseudo R-Square adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### **3.5.2.4 Uji Parallel Lines**

Uji Parallel Lines adalah uji untuk menilai asumsi bahwa semua kategori memiliki parameter yang sama atau tidak (Ghozali, 2011). Nilai yang diinginkan adalah tidak signifikan yaitu  $p > 0,05$ . Jika hasil uji menunjukkan  $p < 0,05$  berarti model tidak cocok. Ketiak cocok ini bisa disebabkan kesalahan dalam membuat peringkat kategori (Ghozali, 2011).

### **3.5.2.5 Uji Hipotesis**

Hasil uji hipotesis dapat dilihat dari parameter estimates di mana terdapat

pengaruh dari masing-masing variabel terikat. Parameter estimates dapat dilihat melalui koefisien regresi. Koefisien regresi dari tiap variabel-variabel yang diuji menunjukkan bentuk hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (*sig*). Apabila terlihat angka signifikan lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi adalah signifikan pada tingkat 5% maka berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. Begitu pula sebaliknya, jika angka signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat.

### **3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda**

#### **3.5.3.1 Uji Asumsi Klasik**

##### **3.5.3.1.1 Uji Normalitas Data**

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Proses uji normalitas data dilakukan dengan uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S)* dan memperhatikan penyebaran data (titik) pada normal *p-plot of regression standardized residual* dari variabel dependen. Pada uji K-S apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)*  $<0,05$  maka  $H_0$  ditolak, hal itu berarti data residual terdistribusi tidak normal. Apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)*  $>0,05$  maka  $H_0$  tidak dapat ditolak karena data residual terdistribusi dengan normal.

### **3.5.3.1.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel independen saling berhubungan secara linier. Multikolinieritas terjadi apabila antara variabel-variabel independen terdapat hubungan yang signifikan. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah multikolinieritas atau tidak adanya hubungan korelasi diantara variabel-variabel independennya. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance  $> 10\%$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

### **3.5.3.1.3 Uji Heterokedastisitas**

Heterokedastisitas berarti varian residual yang tidak sama pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pendeteksiannya dengan menggunakan grafik plot dan uji Glejser, yaitu jika salah satu beta (koefisien regresi) tersebut signifikan secara statistik maka disimpulkan terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2009).

## **3.5.3.2 Uji Hipotesis**

### **3.5.3.2.1 Uji Regresi Berganda**

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan SPSS. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, model regresi logistik yang digunakan ialah :

$$\text{KETERAKSESAN} = \alpha + \beta_1 \text{Polcomp} + \beta_2 \text{Size} + \beta_3 \text{Indep} + \beta_4 \text{Income} + \beta_5 \text{Audit Opinion} + \mu_i$$

Dimana:

IFR	=	Keteraksesan IFR
$\alpha$	=	Konstanta
Polcomp	=	Kompetisi Politik
Size	=	Ukuran Pemerintah Daerah
Indep	=	Kemandirian Finansial Pemda
<i>Income</i>	=	Pendapatan per kapita Masyarakat
<i>Audit Opinion</i>	=	Variaebel <i>dummy</i> jenis opini (kode 1 untuk opini WTP dan 0 untuk opini selain WTP)
$\mu$	=	<i>Error</i>

### 3.5.3.2.2 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi  $R^2$  mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Nilai  $R^2$  mempunyai interval antara 0 sampai 1 ( $0 = R^2 = 1$ ). Semakin besar  $R^2$  mendekati 1) maka semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan bila nilainya semakin mendekati 0 maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009).

#### **3.5.3.2.3 Uji Simultan (*F-Test*)**

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Jika probabilitas  $> 0,05$  maka variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat jika probabilitas  $< 0,05$  maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi dari sampel yang diteliti.

#### **3.5.3.2.4 Uji Parsial (*t-Test*)**

Uji statistik parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan uji  $t > 0,05$  maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan sedangkan jika nilai signifikan uji  $t < 0,05$  maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan secara individual masing-masing variabel.

Hipotesis :

Ho : Variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependent.

Ha : Variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent.

Kriteria pengambilan keputusan :

Ho diterima apabila  $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$  atau  $\text{sig} \geq 5\%$

Ho ditolak apabila  $(t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}} \text{ atau } t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}})$  dan  $\text{sig} < 5\%$ .